

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN INFAK BAGI CALON
JEMAAH HAJI OLEH BADAN AMIL ZAKAT
KOTA PALOPO**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

ANDI MUSFIRA

NIM. 10100115129

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Musfira
NIM : 10100115129
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 18 Maret 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan/Hukum Keluarga Islam/S1
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1
Alamat : Kompl. PU Mallengkeri
Judul : Studi Analisis terhadap Penetapan Infak bagi
Calon Jemaah Haji oleh Badan Amil Zakat Kota
Palopo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 23 Juli 2019

Penyusun

Andi Musfira
10100115129

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN INFAK BAGI CALON JEMAAH HAJI OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA PALOPO , yang disusun oleh Andi Musfira. NIM: 10100115129 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Juli 2019 M
26 Zul-qaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Munaqisy I : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.
Munaqisy II : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.
Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161940031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puja, puji, dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang memberikan telah memberikan segala limpahan rahmat dan petunjuk-petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Infak Bagi Calon Jemaah Haji oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo”, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar. Serta salawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi ummatnya.

Penghargaan terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Arfa Wahid, S.E dan Ibunda Andi Patriani, S.Pd., yang telah memberikan kasih dan sayang yang tak pernah putus dari penulis lahir hingga saat ini. Yang selalu menghaturkan doa kepada penulis serta memberikan dukungan, dorongan, dan motivasi selama menyusun skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa selama proses penyusunan dan penulisan hingga selesainya skripsi ini tak terlepas dari petunjuk, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga sudah sepatutnyalah penulis menghaturkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan baik berupa moril maupun materil selama penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dr. H. Supardin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Peradilan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan petunjuk untuk penyelesaian skripsi ini;
4. Ibunda Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Peradilan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus penguji I yang telah meluangkan waktu dan melakukan perbaikan selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. selaku Penguji II yang telah meluangkan waktunya dan melakukan perbaikan selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang memberikan ajaran dan didikan selama penulis mengikuti bangku perkuliahan;
7. Pegawai struktural Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus staf Jurusan Peradilan, Kak Sri yang banyak membantu penulis selama mengikuti bangku perkuliahan;
8. Ketua dan Staf BAZNAS Kota Palopo atas kesediannya dan memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di kantor BAZNAS Kota Palopo;

9. Kepada saudara-saudaraku, Aulia, Farhan dan Haliza yang memberikan semangat dan doa selama penyusunan skripsi ini;
10. Teman-teman sekelas penulis, PA. D 015, terkhusus kepada Hilya Mufida, Novianti, Fitri, Azmi, Nanda, Citra, Nisa, Nita, Elvi, Dian, Mitha, Dilla, dan Jum, terima kasih atas kesempatan, kenangan, kesetiakawanan, kekompakan, dukungan, dan motivasinya selama ini;
11. Teman-Teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 60 khususnya posko desa Mattirowalie, dan terkhusus untuk bapak Masse Paulle, Ibu Asiah, dan Kak Budiman terima kasih atas dukungan dan doa selama ini;
12. Teman-Teman semasa sekolah yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini;
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat dalam membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan penulis dengan rendah hati mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala-kendala, serta adanya kekurangan dan kekeliruan baik dari segi isi maupun segi sistematiknya yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Samata, 13 Mei 2019

Andi Musfira

NIM: 10100115129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah	11
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah	12
C. Tinjauan Umum tentang Haji	17
D. Tinjauan Umum tentang Infak	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	38

D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	40
G. Penguji Keabsahan Data	40
BAB IV PERTIMBANGAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENETAPAN	
INFAK HAJI	
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Palopo	43
B. Pertimbangan Penetapan Infak Haji di Kota Palopo	48
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Infak Haji	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Implikasi	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas

و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas
---	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbana*

نَجِّينَا: *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di Awal

أُمِرْتُ: *umirtu*

b. Hamzah Tengah

تَأْمُرُونَ: *ta'muruna*

c. Hamzah Akhir

شَيْءٌ : Syai 'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُ دِينَ Dinullah billah

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahrul ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Andi Musfira

NIM : 10100115129

**Judul : Studi Analisis terhadap Penetapan Infak Bagi Calon Jemaah Haji oleh
Badan Amil Zakat Kota Palopo**

Skripsi ini membahas tentang Studi Analisis terhadap Penetapan Infak bagi Calon Jemaah Haji oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo dengan tujuan 1) Mengungkap rumusan pertimbangan Badan Amil Zakat kota Palopo dalam menetapkan infak bagi calon Jemaah Haji kota Palopo 2) Mengungkap tinjauan hukum Islam mengenai penetapan infak bagi calon jemaah haji kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memberikan data dengan detail mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang didapatkan dengan melakukan penelitian serta wawancara secara langsung dilapangan dalam hal ini di BAZNAS Kota Palopo. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i, pendekatan yuridis, serta pendekatan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya infak haji oleh lembaga BAZNAS berserta Kemenag dan Pemkot bagian kesejahteraan rakyat kota Palopo yang biasanya ditetapkan sepekan sebelum ramadhan, berdasarkan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakanginya, antaranya tentang alasan atau pertimbangan penetapan infak haji tersebut yaitu untuk mengajarkan dan menanamkan nilai ikhlas bagi calon jemaah haji serta untuk membantu antara kaum mu'min dalam hal ini dengan adanya infak haji maka calon jemaah haji lebih mudah untuk melakukannya, dan berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa hal tersebut boleh karena merujuk pada peruntukan, manfaat serta alasan pertimbangan penetapan infak haji tidak melanggar nilai syariat Islam.

Implikasi dari penelitian ini yaitu pemberitahuan mengenai adanya infak haji ini disampaikan kepada tiap-tiap calon jemaah haji yang akan berangkat, serta menyampaikan mafaat atau nilai-nilai dari melakukan hal tersebut. Selain itu untuk menilai apakah jumlah infak haji itu memberatkan atau tidak bagi calon jemaah haji, sebaiknya perwakilan dari masyarakat juga diikutsertakan dalam menentukan, misalnya tokoh masyarakat atau semacamnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Palopo adalah Kota yang secara astronomis terletak antara 02°53'15"-03°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"-120°14'34" Bujur Timur. Secara administratif di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu.¹

Jumlah populasi penduduk Kota Palopo mencapai hingga 168.894 (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh empat jiwa dengan 138.950 (seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh) jiwa di antaranya beragama Islam dengan persentase 82.27%.²

Dengan Persentase penduduk yang beragama Islam mencapai 82.27% maka kota Palopo dapat dikatakan sebagai kota yang penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam. Dalam mengatur, melaksanakan dan menertibkan tiap-tiap masyarakatnya maka sudah sepatutnya apabila pemerintah kota Palopo menciptakan peraturan-peraturan demi terwujudnya masyarakat yang tertib, salah satunya dalam hal beragama. Selanjutnya aturan-aturan yang diciptakan tersebut diterapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah kota Palopo mengeluarkan Perda untuk tiap-tiap ketentuan yang mana perda tersebut berisi mengenai perintah, larangan, pemberitahuan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam hal beragama. Salah

¹"Kota Palopo, *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, 25 Agustus 2018.

²"Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2010, 2014 dan 2015", *Badan Pusat Statistik Kota Palopo*. <https://palopokota.bps.go.id/statictable/2016/10/13/7/jumlah-kota-palopo-tahun-2010-2014-dan-2015.html>, 25 Agustus 2018.

satu perda yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palopo dalam hal beragama adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan daerah sebagaimana yang telah disebutkan tidak hanya membahas mengenai Zakat tetapi juga membahas hal lain salah satunya adalah Infak Haji sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat.

Infak sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan selain zakat untuk kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya.³ Adapun landasan hukum Infak menurut hukum Islam yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 273.

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Apa yang kamu Infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang Kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta baik yang kamu Infakkan, Sungguh, Allah Maha Mengetahui.⁴

Allah swt. melalui ayat ini memerintahkan kepada manusia di muka bumi untuk senantiasa memberikan dan mengeluarkan infak dari harta yang telah dilimpahkan daripadanya yang mana tujuannya untuk menjauhkan ummat-ummat

³Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*, h.3.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2013), h. 46.

yang tidak sempat mencari rezeki karena menggunakan waktunya tersebut untuk berjihad di jalan Allah serta menjauhkan manusia dari perilaku meminta-minta.

Infak berarti membelanjakan atau membiayai, yang mana arti tersebut berubah menjadi khusus apabila dikaitkan dengan upaya realisasi dengan perintah-perintah Allah. Adapun hukum infak ada yang wajib, infak yang sunnah, mubah bahkan ada yang haram.⁵ Tidak seperti halnya zakat, Infak tidak memerhatikan nisab dan haul dari harta benda individu. *Nisab* adalah jumlah minimum dari harta keseluruhan yang dikenakan zakat dan *Haul* adalah masa waktu dalam kurun waktu satu tahun dari pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas dan ternak sebagai batas kewajiban untuk menunaikan zakat.⁶

Sedangkan Ahli fiqh, Sayyid Sabiq kontemporer mendefenisikan Haji yaitu seseorang yang dengan niat berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan *tawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah, yang mana dirangkaikan dengan manasik haji lainnya, yang mana dimaksudkan untuk memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridhaan Allah swt.⁷ Selain ketentuan yang terdapat dalam rukum Islam yang mana menyebutkan bahwa melaksanakan haji adalah hukumnya wajib, juga terdapat dalam QS. Ali Imran/ 3: 97.

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke

⁵Qurratul' Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Ziswaf, Vol. 3, No. 1, 2016. h. 45.

⁶Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*. h.3.

⁷Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 20013) h.1.

sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁸

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Sebagai rukun Islam, maka hukum haji adalah wajib sebagaimana berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' menurut para ulama. Meskipun dikatakan wajib, dan semua Ibadah harus dilakukan karena Allah, namun sebagai pengecualian Ibadah haji dan umrah lebih dikhususkan dan ditekankan, karena ibadah haji dan umrah ini adalah ibadah yang melibatkan fisik serta harta yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang lama sehingga memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Kewajiban yang dimaksudkan disini adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang yang mampu secara fisik, waktu dan biaya. Sehingga, bagi orang yang telah mampu secara keseluruhan dan memenuhi persyaratan seperti yang telah disebutkan, maka orang tersebut tidak dapat menunda untuk melaksanakannya. Jika ditunda, maka orang tersebut akan dinilai fasik, karena penundaan itu tergolong ke dalam salah satu perbuatan maksiat.

Seseorang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji dengan memenuhi semua ketentuan, maka Ia dikatakan telah terbebas dari kewajibannya.⁹ Pada intinya, jika seseorang telah mampu baik secara fisik maupun biaya, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk menunaikan Ibadah haji dengan kata lain tidak boleh menunda-nunda untuk melaksanakannya.

Di Kota Palopo, jumlah terhadap penduduk yang berangkat ke Mekkah guna menunaikan ibadah haji dalam periode tiga tahun belakangan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 jumlah yang melakukan ibadah haji sebanyak 86, tahun 2017 sebanyak 128 orang,¹⁰ dan pada tahun 2018 sebanyak 109 orang.¹¹

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62

⁹Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, h. 8-12.

¹⁰Ary Rhm, *CJH Palopo jadi 128 Orang* .(Palopo Pos, 30 Agustus 2016) <https://palopopos.fajar.co.id/2016/08/30/cjh-palopo-jadi-128-orang/>, 25 Agustus 2018.

Hal ini turut membuktikan bahwa antusiasme penduduk kota Palopo untuk menunaikan rukun Islam ke lima ini juga semakin bertambah. Dalam melaksanakan Ibadah Haji, tiap-tiap calon jemaah haji tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan adab-adab bagi calon jemaah haji. Dalam Peraturan Daerah Kota Palopo dalam Pasal 25, Walikota Palopo memutuskan bahwa seorang calon jemaah harus harus membayar infak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, yang mana keputusan tersebut diputuskan berdasarkan atas usulan Badan Amil Zakat Kota Palopo melalui Kantor Departemen Agama Kota Palopo.

Dengan adanya jumlah Infak yang ditetapkan bagi calon jemaah Haji kota Palopo, maka timbullah keinginan penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai Infak Haji yang diputuskan oleh walikota Palopo berdasarkan atas usul Badan Amil Zakat Kota Palopo melalui Kantor Departemen Agama Kota Palopo, karena berdasarkan dengan ketentuan bahwa Infak tidak memiliki jumlah *haul* dan *nisab* yang dikhususkan terutama adalah hal ini adalah calon jemaah Haji. Karena dikhawatirkan, apabila penetapan ini bertentangan dengan syariat dan ketentuan-ketentuan serta menimbulkan kebajikan baik bagi calon jemaah haji ataupun pihak-pihak yang bersinggungan dengan hal tersebut. Selain itu, dalam skripsi ini juga akan menguraikan atau memisahkan antar setiap komponen guna memperoleh kejelasan suatu masalah yang dilihat dari aspek isi serta memahami dan menjelaskan proses dalam masalah tersebut dan berbagai hal di dalamnya, dalam hal ini yaitu mengenai infak haji yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat kota Palopo terhadap jemaah haji.

¹¹ Aris Munandar, *109 Jamaah Haji Kota Palopo Tiba dengan Selamat*, (Online 24 Jam, 30 Agustus 2018) <http://online24jam.com/2018/08/30/117038/109-jamaah-haji-kota-palopo-tiba-dengan-selamat/>, 02 September 2018.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih terfokus dan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang tidak sesuai maka penulis menganggap perlunya mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang dianggap perlu, yaitu:

- a. Studi Analisis;
- b. Infak;
- c. Calon Jemaah Haji;
- d. Badan Amil Zakat.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan dalam skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yaitu:

- a. Analisis

Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹² sehingga peristiwa tersebut tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan.

- b. Infak

Infak adalah pemberian (sumbangan) harta, (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah.¹³ Infak juga berarti harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan selain zakat untuk

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 534.

kemaslahatan umat dengan tidak memperhatikan nisab dan haulnya.¹⁴ Dengan kata lain, bahwa infak merupakan suatu pemberian yang dilakukan dengan cara sukarela dan/atau tanpa paksaan orang lain, baik niat maupun jumlahnya.

c. Calon Jemaah Haji

Calon adalah orang yang akan menjadi atau orang yang diusulkan atau dicadangkan untuk dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.¹⁵ Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah orang yang akan akan melakukan atau menunaikan ibadah haji (ke Mekkah).

d. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat di suatu daerah sesuai dengan cakupannya dan daerah di mana lembaga tersebut berada, dalam hal ini adalah badan amil zakat yang berada di kota Palopo.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Bagaimana Studi Analisis Penetapan Infak bagi Calon Jemaah Haji oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo?”. Dari pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat submasalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Badan Amil Zakat kota Palopo dalam menetapkan Infak bagi calon jemaah haji kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penetapan Infak bagi calon jemaah haji kota Palopo?

¹⁴Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*, h.3.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 238.

D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa skripsi serta hasil penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan Peraturan daerah dalam menetapkan suatu peraturan keislaman diantaranya:

Siswanto Sunarno dalam buku “*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*” pada tahun 2012 memberikan penjelasan mengenai struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membahas mengenai substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia.¹⁶

Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika dalam buku yang berjudul “*Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*” yang terbit pada tahun 2010 yang memberikan penjelasan mengenai giat menyempurnakan zakat dengan melakukan sedekah dan menjelaskan mengenai kekuatan dan keutamaan serta adab-adab bersedekah.¹⁷

Sujamto, dkk dalam buku yang berjudul “*Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974)*” yang terbit pada tahun 1991 memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat sehingga suatu peraturan daerah dapat ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan Daerah itu sendiri.¹⁸

Muh. Sadli Sabir, dengan judul skripsi “*Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis dan Konstitusional)*” tahun 2016

¹⁶Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁷Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Cet. I; Jakarta: Galangpress, 2010).

¹⁸Sujamto, dkk, *Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1947 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah* (Cet. IV; Jakarta: PT. Melton Putra, 1991).

yang membahas mengenai Kontinuitas Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar diantaranya mengenai kekurangan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Sedangkan, dalam skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan infak dan jumlahnya bagi calon jemaah haji.¹⁹

Muh. Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding dalam jurnal yang berjudul “*Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*” pada tahun 2016. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai model pencatatan keuangan serta program-program yang dilakukan di BAZNAS kota Makassar, sedangkan dalam skripsi ini fokus membahas mengenai penetapan infak haji yang mana dirumuskan dan ditentukan oleh Badan Amil Zakat kota Palopo.²⁰

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengungkap rumusan pertimbangan Badan Amil Zakat kota Palopo dalam menetapkan Infak bagi calon jemaah haji kota Palopo
- b. Mengungkap tinjauan hukum Islam mengenai penetapan Infak dan jumlah Infak bagi calon jemaah haji kota Palopo

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

¹⁹Muh. Sadli Sabir, Skripsi, *Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis, dan Konstitusional)*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016).

²⁰Muh. Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding, *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*, Iqtisaduna. Vol. 2 No. 2, 2016.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan penjelasan serta bahan masukan bagi praktisi, pemerhati hukum Islam baik dalam ruang lingkup Kemetrian Agama seperti pegawai Badan Amil Zakat Kota Palopo maupun kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan mengenai alasan dari diadakannya infak dan jumlah infak bagi calon jemaah haji kota Palopo.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah

Kata Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous* yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa otonomi daerah diperlukan pada suatu daerah. Pertama, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kedua, adalah *Local Accountability* yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketiga, adalah *Local Responsiveness* yaitu meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya.²¹

Dengan demikian, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

²¹Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom* (Cet. 3; Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 106.

²²H. Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugerah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Cet. 1; Depok: PT. Raja Grafindo Press, 2018). h. 26.

Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²³ Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota. Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi adalah gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten adalah bupati dan wakil bupati. Sedangkan, kepala daerah kota dan wakil daerah kota adalah waliota dan wakil walikota.²⁴

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan-peraturan yang menyangkut daerah lainnya, yang mana Perda diharapkan mampu mendukung secara sinergis

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, h. 2.

²⁴H. Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugerah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 26.

program-program Pemerintah di daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perda mempunyai fungsi yaitu sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah.²⁵

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah (Perda)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencantumkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut di atas, peraturan daerah menempati jenjang yang paling akhir. Berarti, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Bertentangan dengan kepentingan umum yang dimaksud adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya pelayanan umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai salah satu

²⁵ Muhammad Sapta Murti, *Harmonisasi Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 22 April 2019), 30 Juli 2019.

keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.

Secara yuridis, pengertian perundang-undangan dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan kata perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Adapun muatan perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
3. Peraturan desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-

Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Provinsi/Kabupaten/Kota. Prolegda adalah Program Legislasi Daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang dijalankan pemerintah. Legislasi adalah pembuatan undang-undang, dan daerah adalah lingkungan pemerintah; wilayah kabupaten. Jadi prolegda adalah rancangan mengenai pembuatan peraturan daerah di lingkungan pemerintahan.

Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Namun, keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar program program pembentuka perda karena alasan mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menindaklanjuti kerja sama pihak lain, mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang membidangi pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah, akibat pembatalan oleh menteri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk perda kabupaten/kota, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan perda ditetapkan.

Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundnag-undangan lebih tinggi;

- b. Rencana pembangunan;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah;
- d. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- e. Aspirasi masyarakat daerah.

Rancangan Perda yang telah disetujui disampaikan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi perda. Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor registrasi perda. Setelah mendapat nomor register dari menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima. Rancangan perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Apabila perda telah sah, maka wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Peraturan Kepala Daerah atau Perkada hanya diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan atau terdapat pendelegasian dari peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Perda provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun fungsi peraturan daerah menurut DEPHUKHAM dan UNDP dapat disebutkan anatara lain:

- 1) Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI; dan
- 4) Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁶

C. Tinjauan Umum tentang Haji

1. Pengertian Haji

Haji diambil dari kata (الْحُجُّ) atau (الْحَجُّ) yang artinya tujuan, dan orang Arab mengartikannya dengan setiap berpergian menuju tempat yang dimuliakan dengan *Hajjan*.²⁷ Haji menuut bahasa ialah menuju ke suatu tempat secara berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Oleh karena para muslim mengunjungi Baitulah al-Haram berulang kali pada tiap-tiap tahun dimanakan ibadah tersebut dengan *haji*, atau *musk* (ibadah).²⁸

Pengertian haji menurut syariat adalah pergi menuju Al-Bait Al-Haram untuk mengerjakan ibadah yang khusus pada waktu yang khusus pula.

Definisi di atas meliputi empat perkara:²⁹

²⁶H. Andi Pangerang Moenta dan H. Syafa'at Anugerah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, h. 123-130.

²⁷Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi)*, (Cet. I; Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009), h. 59-61.

²⁸Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji* (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 1-2.

²⁹Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunna Nabi)*, h. 62-65.

a. Niat untuk menjalankan ibadah

Dari perkataan di atas (tujuan), sesungguhnya tidak ada tujuan, kecuali disertai dengan niat dan tidak ada perbuatan, kecuali disertai dengan niat pula, sebagaimana *Allah Ta'ala* berfirman dalam QS Al-Ahzab/33:5 yaitu:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣١﴾

Terjemahan:

Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.³⁰

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ³¹

Artinya:

Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³²

b. Bolehnya mengadakan safar menuju Al-Bait Al-Haram

c. Hanya melakukan ibadah haji saja sesuai dengan sunnah yang telah sampai kepada kita

Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Artinya:

Ambillah dariku cara kalian menjalankan manasik haji!³³

³⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 418.

³¹ Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Bukhari, Musnad *Shahih Bukhari*, Jus IX, (t.t, t.p, 1422 H/ 2002 M).

³²Imam Nawawi, *Matan Hadist Arba'in*, (Jakarta: Nizhom,t.th), h. 1-2.

d. Sesungguhnya melakukan ihram untuk haji tidak diperkenankan, kecuali pada bulannya.

2. Hukum Ibadah Haji

Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan³⁴, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam QS Al-Imrān/3: 97, yaitu:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ

Terjemahan:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.³⁵

Redaksi perintah Allah kepada umat Muslim dalam melaksanakan ibadah haji berbeda apabila dikaitkan dengan perintah-Nya untuk melaksanakan ibadah lain. Allah mewajibkan shalat kepada umat Islam dengan menggunakan ungkapan: “Dirikanlah shalat.” Dan dalam masalah kewajiban zakat, “Tunaikanlah zakat.” Penggunaan ungkapan *wa lillahi*, mempunyai arti cukup dalam, yakni dalam melaksanakan haji harus lebih ikhlas karena Allah. Karena haji merupakan ibadah yang bukan hanya melibatkan dari segi fisik dan harta yang dalam pelaksanaannya memakan waktu beberapa hari, sehingga membutuhkan pengorbanan yang cukup besar.³⁶

³³ Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Haji, Umrah dan Ziarah Menurut Kitab dan Sunnah* (Saudi Arabia: Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam, 2001), h. 36.

³⁴ Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, h. 1.

³⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

³⁶ Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur* (Cet. I, Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), h. 7-9.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt. mensyariatkan bahwa hukum melaksanakan ibadah haji adalah suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, jika di dalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yang mana jika di dalam dirinya telah terpenuhi namun Ia menundanya maka sama dengan melakukan maksiat.

Sebelum ayat mengenai kewajiban melaksanakan haji tersebut, Allah menjelaskan hakikat agama Nabi Ibrahim As. yang selama ini dikalim oleh orang Yahudi sebagai bahwa mereka pewaris Nabi Ibrahim As.³⁷

Kewajiban haji ini dipertegas Nabi Saw dalam hadis berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ³⁸

Artinya:

Islam itu didirikan di atas lima prinsip dasar, yaitu: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan puasa pada bulan Ramadhan.” (Mutafaqun ‘Alaih)

Sangatlah dianjurkan supaya orang yang wajib mengerjakan haji segera mengerakannya. Apabila menunda-nunda haji di saat mampu untuk melaksanakannya, maka akan dkhawatirkan haji tersebut akan luput di kerjakan. Dalam hal itu, haji boleh di-*takhir*-kan dari tahun ke tahun, mengingat bahwa menurut jumhur, haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 H. dan Nabi saw. baru melakukannya pada tahun ke-10 H. tanpa ada *uzur*.³⁹

Pendapat perlunya menyegerakan ibadah haji bagi yang mampu juga dikemukakan Sayyidina Ali RA. yang memperingatkan orang yang mampu, tetapi lalai mengerjakan haji. Sayyidina Ali mengatakan:

³⁷Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 10.

³⁸Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu’anhuma, *Musnad Sahih Muslim no. 16 dan Al-Bukhari no. 8*, (t,d).

³⁹Tgk. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, h.3.

“orang yang telah mampu untuk melaksanakan haji, tetapi ia enggan melaksanakannya, maka janganlah sampai orang tersebut mati seperti matinya orang Yahudi atau Nasrani”.

Setiap perintah Allah dan Rasul-Nya hukumnya masuk dalam kategori yang wajib mutlak harus langsung dilakukan kecuali adanya indikasi yang menghalangi untuk segera dilakukan. Bagi jumhur mazhab Syafi’i, kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tidak harus segera ditunaikan, namun apabila sudah mampu, maka telah dianjurkan (disunatkan) segera menunaikan agar tanggung jawab atau kewajiban tersebut terlepas dari dirinya.

Kewajiban haji bagi muslim hanya sekali seumur hidup, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

Artinya:

Kewajiban haji hanya satu kali, dan barangsiapa yang menambah, itu merupakan perbuatan sunat (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i, dan al-Hakim).⁴⁰

Haji termasuk ibadah *mahdhah*, yang mana semua tata cara pelaksanaannya tergantung pada apa yang tercantum dalam Syari’ (Allah dan Rasul-Nya). Dengan kata lain, Umat Islam tidak boleh menambah atau mengurangi syari’at haji, kecuali sebatas pengembangan dari apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah.⁴¹

3. Syarat Haji

a. Syarat Wajib Haji

Syarat adalah sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum tersebut. Syarat wajib haji adalah ketentuan-

⁴⁰Syaikh ‘Abdullah bin Sholi Al-Fauzan, *Minhatul’Allam fii Syarh Bulughul Marom* (Cet. III, t.t, 2011), h. 189-190.

⁴¹Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama’ah mencapai Haji Mabrur*, h. 11-12.

ketentuan atau syarat-syarat apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya.⁴²

Ada empat syarat wajib haji, yaitu:

- 1) Orang yang mengerjakan haji itu beragama Islam;

Beragama Islam merupakan salah satu syarat wajib, yang mana ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang murtad, sebab pembebanan ibadah telah hilang dari dirinya seiring dengan kemurtadannya.⁴³ Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepada-Nya dan patuh dengan melakukan ketaatan kepada-Nya serta berlepas diri dari kesyirikan. Seorang muslim adalah orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, orang yang menyerahkan diri kepada Allah secara *zhahirnya* setelah meyakinkannya dalam hati.⁴⁴

- 2) Orang yang mengerjakan haji itu mukalaf;

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap dalam bertindak secara hukum, baik perintah Allah swt. maupun larangan-Nya. Dasar pembebanan hukum ini adalah orang yang telah baligh, berakal, dan mempunyai pemahaman.⁴⁵ Berakal adalah dapat membedakan mana yang halal dan haram, dan mampu melarang para pelaku dosa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Orang yang berakal adalah orang yang yang paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan syariat, dan mampu menempatkan segala sesuatu

⁴²Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 20-21.

⁴³Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 22.

⁴⁴Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunna Nabi)*, h. 103.

⁴⁵Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 22.

sesuai dengan tempatnya.⁴⁶ Sedangkan, Baligh adalah keadaan dimana seorang anak laki-laki memasuki fase setelah masa anak-anak yang ditandai dengan mimpi basah, dan ciri-ciri fisik lainnya, sedangkan bagi anak perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi.

3) Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (budak bukan belian);

Budak tidak diwajibkan atasnya ibadah haji karena segala pekerjaannya merupakan hak milik tuannya, dan Allah tidak menjadikan agama ini, menyulitkan hamba-hamba-Nya.⁴⁷ Hamba sahaya (budak) tidak diwajibkan atasnya untuk menunaikan ibadah haji, karena sebagaimana yang diketahui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan biaya pribadi yang mana jumlahnya tidak sedikit.

4) Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan melakukannya.

Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki kemampuan itu memiliki tiga komponen yaitu kekuatan badan atau fisik, kemampuan harta dan keamanan. Sedangkan, ulama mazhab Syafi'i kriteria kemampuan itu meliputi tujuh kemampuan, yaitu kekuatan fisik, kemampuan harta, tersedianya kebutuhan pokok yang akan dikonsumsi selama di tanah suci, perjalanan dan di tanah suci aman, jika yang menunaikan haji itu seorang wanita, harus ada mahramnya. Seluruh kemampuan itu harus diperhitungkan semenjak bulan Syawal sampai berakhirnya pelaksanaan amalan-amalan haji.⁴⁸

⁴⁶Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunna Nabi)*, h. 105.

⁴⁷Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunna Nabi)*, h. 107.

⁴⁸Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 24.

b. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakannya dipandang sah (diterima). Namun, jika ketentuan itu tidak terpenuhi, ibadah haji yang dilaksanakan tidak sah.

Seperti yang dikemukakan Abdurrahmah al-Jarizi, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

1) Beragama Islam (Muslim)

Ibadah haji menjadi sah apabila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, ibadah haji tidak sah jika dilaksanakan oleh orang kafir atau murtad dan tidak sah pula mewakilinya.

2) *Mumayyiz*

Mumayyiz adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang buruk dan berbahaya dengan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan mudarat.

Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* mulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil-baligh. Ibadah haji yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* hukumnya sah.

3) Amalah ibadah haji harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan Syawal, Zulqaidah dan sembilan hari pertama bulan Zulhijjah sampai terbit fajar

hari kesepuluh atau yang disebut juga *Yaun an-Nahr*, serta dua hari Tasyrik.⁴⁹

4. Macam-Macam Pelaksanaan Ibadah Haji

Dari segi cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dapat dikelompokkan dalam tiga macam, yaitu haji *Ifrad*, haji *Tamattu'*, dan haji *Qiran*⁵⁰ Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَ أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ بِقُدُومِهِ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَجَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى كَانِ يَوْمَ النَّحْرِ.⁵¹

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata: Kami berangkat menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah Saw. pada tahun haji wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji. Orang yang berihram untuk umrah, bertahallul untuk haji jika ia mengumpulkan haji dan umrah, maka ia tidak bertahallul sampai ia selesai melaksanakan amalan pada hari nahar. (H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Malik).⁵²

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa macam-macam pelaksanaan haji terdiri atas tiga macam. Dari ketiga macam haji tersebut, masing-masing memiliki tata cara yang berbeda, sebagaimana yang akan dijabarkan.

⁴⁹Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, (Cet. I, Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003), h. 27-28.

⁵⁰Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 43.

⁵¹Abi Husain Muslim bin Hajjah Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Musnad Sahih Muslim*, juz XVII, (t.d), h. 277.

⁵²Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (t.d), h. 480-481.

a. Haji Ifrad

Kata *Ifrad* berarti *menyendiri*. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad, bila seseorang melaksanakan haji secara tersendiri, kemudian melaksanakan umrah dengan tersendiri pula, dengan kata lain melaksanakan haji terlebih dahulu secara tuntas, lalu melakukan ibadah umrah setelahnya.

Pelaksanaan haji ifrad menghendaki jamaah haji senantiasa memakai pakaian ihram ketika tidur, duduk, atau berdiri tanpa pakaian dalam. Mereka yang memilih haji ifrad dianjurkan pula melakukan tawaf qadum, yaitu tawaf sunat saat pertama kali tiba di Mekkah, dan Sa'i. Nanti selesai tawaf ifadah tidak wajib lagi bersa'i. Kalau melaksanakan tawaf qudum saja, maka wajib bersa'i selesai tawaf ifadah.

b. Haji Tamattu'

Kata *Tamattu'* berarti bersenang-senang atau bersantai-santai. Bila dikaitkan dengan ibadah haji, tamattu' ialah melakukan ihram untuk melaksanakan umrah di bulan-bulan haji. Setelah seluruh amalan umrah selesai, langsung mengerjakan ibadah haji. Dinamakan haji tamattu', karena melakukan dua ibadah (umrah dan haji) di bulan-bulan haji dalam tahun sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu.

c. Haji Qiran

Kata qiran dapat diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Adapun dalam terminologi fikih, haji qiran ialah pelaksanaan ibadah haji dan umrah sekaligus dan dengan satu niat. Haji qiran menjadi jenis haji yang paling populer di antara calon jamaah haji karena dinilai lebih praktis dalam melaksanakannya. banyak dipilih oleh jamaah yang waktunya terbatas. Dalam hal ini, prosesi tawaf, sa'i, dan

tahallul untuk haji dan umrah hanya dilakukan satu kali atau sekaligus dan umrah hanya dilakukan satu kali atau sekaligus.⁵³

5. Persiapan Berangkat Haji

a. Mental

Melakukan perjalanan ke Mekkah tentu tidak sama dengan melakukan perjalanan ke tempat lain. Perjalanan ke Mekkah merupakan perjalanan untuk menunaikan seruan Sang Maha Pencipta. Karena ditujukan untuk mengikuti panggilan Allah swt. yang Mahasuci, maka sebulum hati yang perlu diucikan terlebih dahulu, mulailah segera bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat dari segala dosa. Persiapkan rohani dengan doa-doa. Mengikhlaskan hati semata-mata untuk melaksanakan perintah-Nya dan menaati segala seruan-Nya untuk mengharapkan ridha-Nya.

Jauhkan diri dari segala rasa ingin dipandang, ingin tersohor, atau berbangga diri. Mulailah membiasakan diri untuk selalu memperbanyak kebaikan terhadap diri, orang lain dan Allah dengan memperbanyak zikir, mempererat tali silaturahmi, atau memperbanyak istigfar kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama. Jagalah semua amal tersebut dari segala kekotoran yang bisa merusaknya. Janganlah dengan sengaja menunda perbaikan kekurangan iman. Perlu diingat, bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji berarti telah siap menghadapi segala kemungkinan termasuk bila wafat ketika sedang menunaikan ibadah tersebut. Menunaikan ibadah haji sama artinya dengan telah siap menuju Allah.

⁵³Said Agil Husin Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah mencapai Haji Mabrur*, h. 43-56.

b. Pengetahuan

Selain mental, calon jemaah haji hendaknya juga mempersiapkan dan mendalami syariat mengenai tata cara ibadah haji. Dengan demikian, pada saat pelaksanaannya, para calon mampu beribadah dengan tenang karena yakin dengan ilmu yang telah dimiliki dan tidak bingung apabila melihat perbedaan beribadah di antara jemaah.

Calon jemaah haji juga hendaknya memahami rute tempat-tempat penting. Selain itu, hendaknya calon jemaah juga mempersiapkan diri dengan berbagai pengetahuan mengenai latar belakang sejarah tempat-tempat ziarah, sehingga telah memiliki sedikit gambaran mengenai tempat tersebut.

Dalam manasik haji, yang perlu disiapkan sejak awal adalah menghafal ziki-zikir penting dan doa-doa.

c. Kesehatan Jasmani

Persiapan kondisi fisik juga tidak kalah pentingnya, calon jemaah harus tetap bugar dan sehat selama melaksanakan ibadah haji, sebaiknya melakukan beberapa olahraga atau aktivitas fisik sehingga pada saat telah sampai ke tanah suci, Mekkah calon jemaah lebih mudah beradaptasi terhadap aktivitas maupun cuaca ketika berada di sana.

d. Materi/ Uang

Salah satu syarat menunaikan ibadah haji adalah mapu dari segi materi. Keuangan sebaiknya dipersiapkan dengan baik baik pada saat berada di Tanah Suci nantinya, maupun cukup bagi keluarga yang kan ditinggalkan. Hendaknya mencari uang dengan jalan yang halal, lalu kemudian membersihkannya dari jalan yang akan mengetornya.

e. Peratalan yang Perlu Dibawa

Sebelum melakukan perjalanan ke tanah suci, hendaknya calon jemaah haji mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan diperlukan selama berada di sana selama masih di daerah asal. Sehingga, ketika sampai para jemaah tidak lagi disibukkan dengan hal-hal tersebut dan fokus untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana tujuan awalnya.

f. Muhrim bagi Wanita

Sesuai dengan ketentuan syariat, jemaah haji wanita harus disertai dengan muhrimnya atau suaminya, atau bermuhrim kepada orang lain (sesuai dengan ketentuan agama). Di samping itu, dalam setiap regu jemaah harus ada pria untuk mengatur dan memimpin.⁵⁴

6. Hikmah Haji

Sebagaimana bahwa shalat berjamaah amat penting, artinya baik shalat baik pada saat shalat fardhu maupun shalat sunat. Shalat jemaah seperti shalat taraweh, shalat Idul Fitri dan Adha, shalat gerhana matahari dan bulan. Bahkan seminggu sekali diwajibkan untuk shalat berjamaah pada shalat Jum'at.

Demikian juga halnya mengenai ibadah zakat, diantaranya hikmahnya adalah adalah memupuk rasa kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, di antara hikmah puasa adalah melati kesabaran dan disiplin.

Ibadah haji, jangkauannya lebih luas lagi, tidak bersifat lokal, regional (daerah), dan nasional, tetapi sudah bersifat internasional, karena yang datang ke Tanah Suci, Mekkah adalah umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Adapun dikmahnya, antara lain:

⁵⁴Kelompok Empat Satu, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umroh*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 36-41.

a. Membina dan Memupuk Persatuan Umat Islam

Pada saat melaksanakan ibadah haji, etnis (suku), warna kulit, bangsa, pangka kedudukan dan erasaan telah melebur menjadi satu, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Pada saat itu tidak ada debat yang membawa perpecahan, tidak ada permusuhan yang mengakibatkan kemusuhan, tidak ada pemboikotan yang merusak tatanan ekonomi umat, tidak ada fitnah dan dengki yang merusak hubungan sesama umat Islam.

Perstuan yang sudah dibida dan dipupuk selama menjalankan ibadah haji, adakalanya sesudah kembali ke tempat dan tanah air masing-masing, penyakit lama kambuh kembali. Perbedaan warna kulit, etnis, bangsa, perpecahan, permusuhan, pembiokotan, dengki dan fitnah dihidup suburkan kembali.

b. Menghapus Dosa

Selaku manusia biasa, bukan hamba pilihan, banyak kesalahan yang diperbuat, banyak larangan yang dilanggar, disengaja atau tidak, yang mengakibatkan dosa bertumpuk.

Ibadah haji adalah di antara amal yang dapat menghapus dosa-dosa tersebut. Pada saat seorang pergi menunaikan ibadah haji, maka orang itu membawa dosa, dan pada saat kembali maka orang itupun bersih dari dosa tersebut bila haji yang ditunaikan dengan niat yang ikhlas, bukan karena ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Di samping itu, hendaknya setela pulang dari tanah suci, jangan lagi mengetuk pintu dosa-dosa untuk melakukan atau membuat dosa yang baru.

c. Meningkatkan Semangat Juang (Jihad)

Jihad dalam Islam atau memperjuangkan agama nilainya amat tinggi. Menyabung nyawa di medan perang, adalah jihad dan tidak semua orang dapat berlaga di medan perang, karena kodratnya seperti wanita, karena tua, karena lemah fisik dan sebagainya. Tetapi ada amal yang bernilai jihad, yang tidak mengambil resiko tinggi, di antaranya yaitu menunaikan ibadah haji.

d. Mendapat Kehormatan Sebagai Tamu Allah

Para jemaah haji dan umroh di tanah suci, sebagai tamu Allah dilayani dan disantuni. Pelayanan dan santunan terhadap jemaah haji dan umroh adalah, bila mereka berdoa dikabulkan dan bila memohon ampun maka akan dimapuni.

e. Mengadakan Hubungan Antar Bangsa

Jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia, yang berbeda ras, bahasa, adat istiadat dan perbedaan-perbedaan lainnya, di tanah suci disatukan oleh akidah yang sama dihubungkan oleh tali agama Islam.

Pada saat sampai ke tanah suci, yang menjadi tugas pokok adalah ibadah haji, di samping itu terbawa serta pula persoalan lain seperti menjalin hubungan dangang, diplomatik, persahabatan antar sesama pemimpin dan kegiatan-kegiatan lain, walaupun tidak secara resmi.

f. Menempati Surga Sebagai Balasan Amal

Menunaikan ibadah haji adalah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat, tetapi dalam pandangan Allah, ibadah itu mempunyai nilai tinggi dan akan dibalas dengan surga.⁵⁵

⁵⁵M. Ali Hasan, *Tuntutan Haji: Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 2-8.

D. Tinjauan Umum tentang Infak

Kata Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta keseluruhan atau pendapatan/penghasilan yang diperuntukkan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Infak juga berarti pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang, apabila ia memperoleh rizki sebanyak yang disanggupi atau kehendaki. Allah tidak pemilik harta dalam menentukan jenis harta, serta jumlah yang sebaiknya diserahkan dari harta tersebut.⁵⁶

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata. Atau bisa dikatakan infak adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.⁵⁷

Berinfak adalah salah satu amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam, banyak *nash* yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya Perintah Infak dalam firman Allah swt. QS Al-Baqarah/2 ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁸

⁵⁶Muh. Fardan Ngoyo dan Lince Bulutoding, *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*, h. 4-5.

⁵⁷N. Noviana, Skripsi: “Efektivitas Zakat, Infak, dan Sedekah” (Semarang: UIN Walisongo, 2016), h. 58.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

Ayat ini seakan-akan berkata bahwa: jika kalian enggan menafkahkan harta kalian dalam berperang atau berjuang di jalan Allah, musuh yang memiliki perlengkapan lebih kuat dari kalian akan dapat mengalahkan kalian, dan bila hal tersebut terjadi, kalian akan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan, akan hilang dari kalian nilai-nilai positif yang selama ini meekat pada diri kalian, seperti keyakinan akan keesaan Allah, kemerdekaan, kebebasan, bahkan hidup dan ketenangan lahir dan batin. Ayat tersebut juga bermakna bahwa jangan tidak menafkahkan menafkahkan harta kalian di jalan Allah karena, jika demikian kalian akan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Betapa tidak, harta yang berada di tangan, tanpa dinafkahkan di jalan Allah, bukan saja akan habis oleh pemiliknya atau dimiliki ahli warisnya, tetapi juga membinasakan pemiliknya di hari kemudian.⁵⁹

Ayat ini diturunkan Allah sehubungan dengan hukum memberi nafkah kepada istri, anak, dan keluarga. Sebab pada saat itu permasalahan nafkah belum diatur sedemikian rupa, sehingga masih ada kesimpangsiuran.⁶⁰

Selain ayat di atas, perintah menunaikan infak juga terdapat dalam QS. Al-Tālaq/65: 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah kepada menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁶¹

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 512-514.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2013), h. 31.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 559.

Allah swt. dalam ayat tersebut memerintahkan bahwa bagi tiap-tiap orang yang memiliki resek yang cukup atau bahkan berlebih, maka hendaklah memberikan nafkah dan rezeki kepada orang lain dari harta itu. Dala ayat ini, dijelaskan secara umum, tidak dikhususkan bahwa dalam tiap-tiap suatu peristiwa seseorang diharuskan untuk mengeluarkan infak, misalkan pada saat akan berangkat haji. Selain itu, sebagaimana yang terdapat dalam terjemah ayat ini Allah swt. tidak menyertakan *nisab* serta *haul* yang menjadi ukuran seseorang diharuskan mengeluarkan infak. Hanya dikatakan, bahwa selama orang tersebut merasa lapang maka keluarkanlah.

Selain firman Allah swt. sebagaimana yang telah dipaparkan, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنِ آدَمَ ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ.

Artinya:

Allah Yang Mahasuci lagi Maha Tinggi berfirman: Wahai anak Adam! Berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberi Rizki) kepadamu. (HR. Muslim).

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul saw. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri, menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta tersebut hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infak.⁶²

Berdasarkan hukumnya infak dikategorikan menjadi dua bagian yaitu infak yang wajib dan sunnah. Infak wajib seperti zakat, kafarat, nadzar, dan lain-

⁶² Qurratul' Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, h. 45.

lain. Sedangkan infak sunnah adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Sedangkan secara hukum infak terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:

1. Infak mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
2. Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.
3. Infak haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu: infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.
4. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan untuk bersadaqah.⁶³

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada pula yang sedikit, dan bahkan ada yang walaupun hanya untuk sehari-hari pun susah untuk didapatkan. Kesenjangan itu perlu didekatkan, yang mana salah satu caranya yaitu dengan infak. Selain itu, infak juga berfungsi sebagai salah satu tabungan untuk di akhrat kelak.⁶⁴

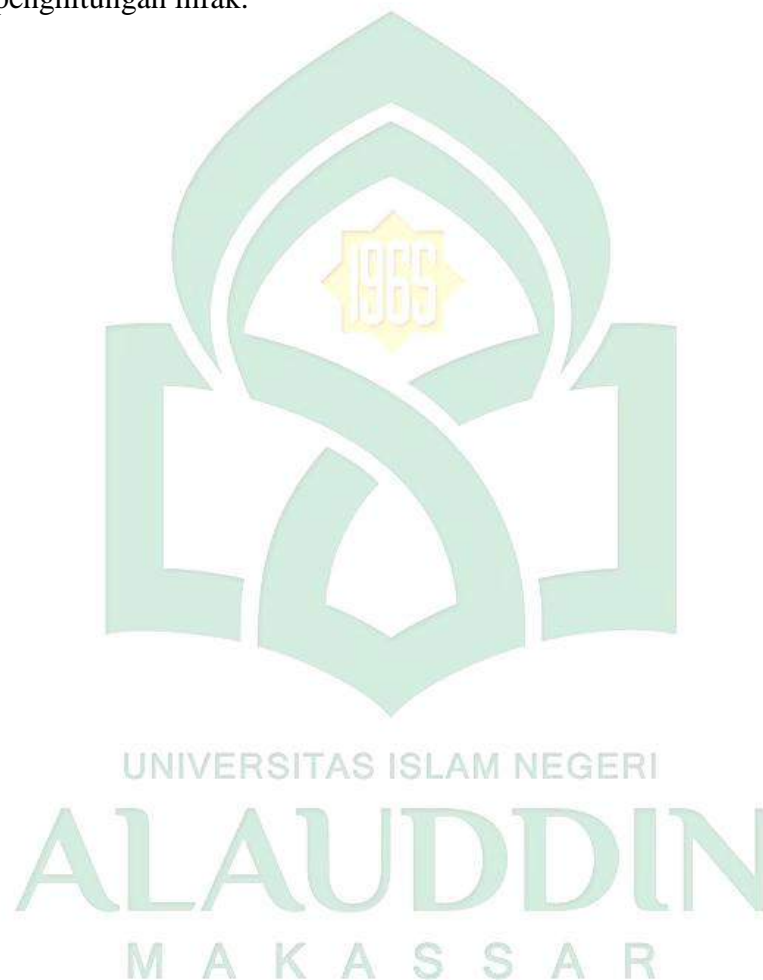
Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infak menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.

⁶³ Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, h. 49-50.

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2015), h. 16-17.

2. Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infak dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infak.⁶⁵



⁶⁵N. Noviana, Skripsi: *Efektivitas Zakat, Infak, dan Sedekah*, h. 59- 60.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dengan objek penelitian yaitu Kantor Badan Amil Zakat Kota Palopo, untuk memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai pertimbangan sehingga ditetapkannya infak haji di Kota Palopo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memberikan data dengan detail mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang didapatkan dengan melakukan penelitian secara langsung dilapangan dalam hal ini adalah BAZNAS Kota Palopo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan syar'i, pendekatan yuridis, serta pendekatan secara sosial. Secara harfiah pendekatan syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan memandang segala suatu hal berdasarkan syar'iat Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan masalah infak haji beserta jumlahnya. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang relevan dengan masalah yang akan di bahas, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Zakat, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagainya, Sedangkan pendekatan sosial adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan infak haji serta jumlahnya di dalam masyarakat Kota Palopo.

C. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pustaka yang didapatkan melalui *library research* yang mana berarti metode yang dilakukan dengan cara membaca dan memindai literatur-literatur atau bacaan yang berkaitan dengan Infak haji beserta jumlahnya, dalam hal ini bahan-bahan penelitian yang dimaksudkan terkait dengan metode *library research* adalah:

1. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti⁶⁶. Adapun sumber data primer yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, yaitu hasil dari wawancara terhadap ketua BAZ kota palopo dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan dalam skripsi ini.

2. Sumber data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dokumen dan laporan-laporan yang menyangkut penelitian baik dari BAZ itu sendiri ataupun dari dinas.⁶⁷

⁶⁶Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet.II, Depok: PT. Raja Grafindo Perss, 2014), h. 42

⁶⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h. 42.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan tersebut terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁶⁸

Dalam penelitian ini, adapun pihak yang diwawancarai adalah Ketua Badan Amil Zakat Kota Palopo, beserta pihak-pihak yang mengetahui duduk permasalahan dalam penelitian ini.

2. Studi dokumen atau bahan pustaka

Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, serta membuat catatan yang diperlukan terkait masalah mengenai hal-hal yang diteliti⁶⁹, termasuk Perda Kota Palopo No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data penelitian saat memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, studi kepustakaan melalui *library research*, media elektronik, serta tambahan instrumen berupa alat tulis. Instrumen-instrumen tersebut nantinya akan memudahkan penulis untuk mengembangkan dan mengelola data yang di dapatkan saat penelitian.

⁶⁸ H.M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. V, Jakarta: Kencana, 2011), h.111.

⁶⁹ M. Ade Setiawan AR: Skripsi, *Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Cara Mediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 31.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan menjabarkan hal-hal terkait yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat melakukan pendataan dan perumusan hasil penelitian yang telah dilakukan yang selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif, terhadap data-data yang di dapatkan selama melakukan penelitian di lapangan maupun melalui kajian kepustakaan yang disortir yang kemudian disusun dan disimpulkan secara sistematis.

Dalam penelitian ini, data dianalisa secara kualitatif, yaitu cara yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan didapatkan melalui kemantapan peneliti berdasarkan hal-hal yang di dapatkan selama melakukan penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

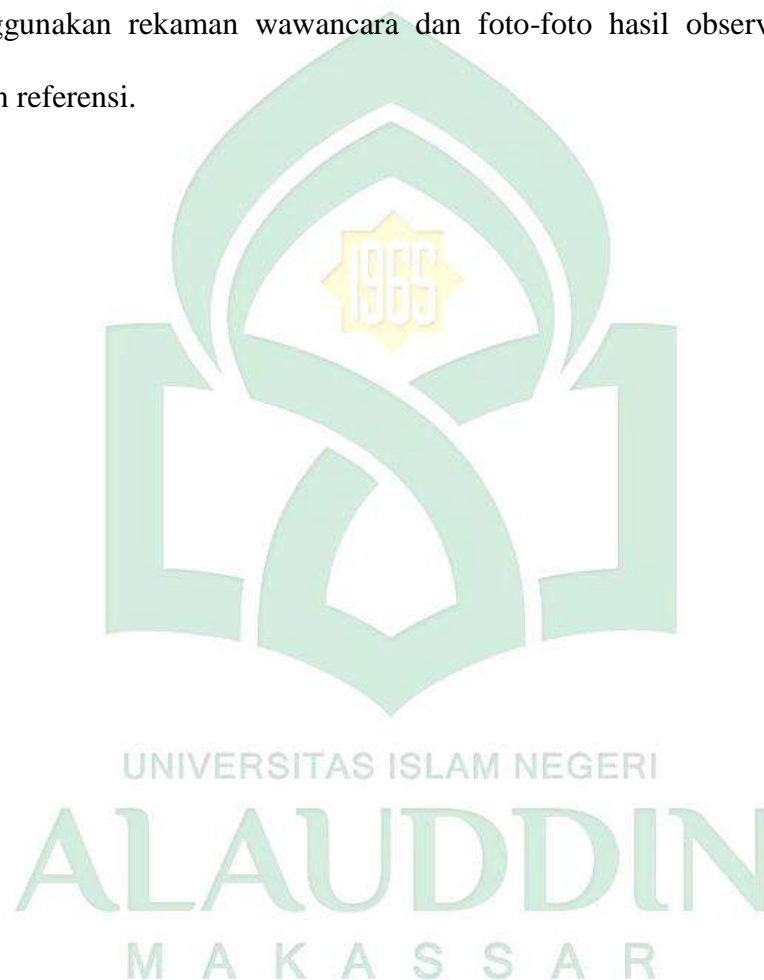
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



BAB IV

PERTIMBANGAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENETAPAN INFAK HAJI

A. *Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kota Palopo*

1. Sejarah BAZNAS Kota Palopo

Praktek pengelolaan zakat dalam 13 abad perjalanan Islam di Indonesia dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Sampai kemudian disadari oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia akan perlunya lembaga untuk mengelola zakat. Sejarah perkembangan zakat pun terus bergulir, puncaknya dengan disahkannya undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tanggal 23 September 1999 pada akhir pemerintahan BJ. Habibie.

Dengan disahkannya undang-undang pengelolaan zakat, maka Indonesia memasuki babak baru dimana zakat menjadi elemen penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan hadirnya undang-undang dan keputusan tersebut maka berdiriah Badan amil Zakat Nasioal (BAZNAS) sebagai lembaga pengelolaan Zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelolaan zakat.

Selain berdirinya BAZNAS UU pengelolaan zakat juga menegaskan berlakuknya pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, meskipun belum memenuhi harapan utama ummat akan tetapi akomodasi pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan

bentuk motivasi dan pengakuan sehingga ummat lebih terdorong untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat formal.

Di kota Palopo, Berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003, BAZ Kota Palopo didirikan sebagai pengelola Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo, dengan demikian maka BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kab. Luwu akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yaitu Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang mendasari dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo. Pada saat itu hanya ada 4 (empat) Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat *fitrah*, zakat *maal* dan infak rumah tangga muslim. Setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan di setiap kecamatan pada tahun 2007.

Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- a. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 (Sembilan) orang
- b. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 (tujuh) orang
- c. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsure ketua, sekretaris, dan bendahara 11 (sebelas) orang dibantu Bidang

Pengumpulan 14 (empat belas) orang Bidang Pendayagunaan, 9 (Sembilan) orang Bidang Pengemabangan, 9 (Sembilan), dan Pendistribusian 7 (tujuh) orang dan sekertarian/operator 5 (lima) orang atau seluruh personalia 71 (tujuh puluh satu) orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Namun, dengan adanya hal tersebut membuat BAZ tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sehingga, pada tahun 2005 dibuatlah suatu perencanaan untuk membentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS.

Tahun 2006, seiring dengan adanya peraturan daerah kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat maka pembentukan panitia tersebut disahkan dan mulai disosialisasikan pada tahun 2006 ke seluruh daerah di kota Palopo yang meliputi 9 Kecamatan, serta instansi seperti TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemerintah Kota Palopo. Mengacu pada perda tersebut, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMA, SMP, SD, BUMD/BUMN, hingga tahun 2011 telah dibentuk 53 UPZ. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ Kota Palopo, maka dimulai pada bulan September Tahun 2006 dibuatlah Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006

dengan personalia hanya 9 orang yang terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahunnya hingga saat ini.

2. Visi dan Misi BAZ Kota Palopo

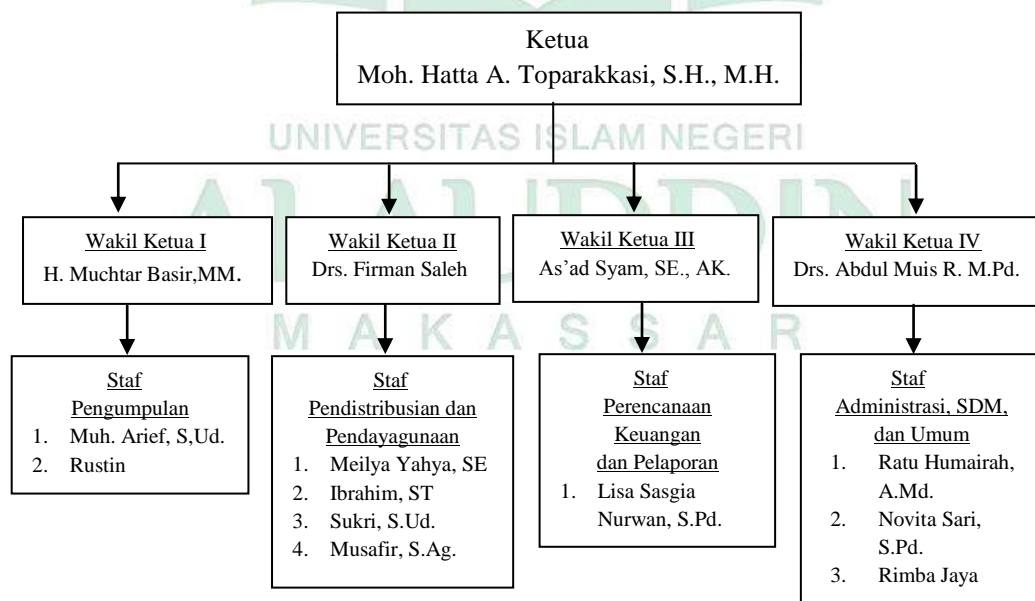
a. Visi

Visi Badan Amil Zakat kota Palopo adalah terwujudnya Badan Amil Zakat Kota Palopo yang jujur, professional, dan transparan dalam menjalankan amanah ummat berdasarkan syariat Islam.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat, Infak, sedekah, dan wakaf
- 2) Mengembangkan pengelolaan BAZ yang professional, amanah, jujur, dan bermoral
- 3) Menjadikan BAZ sebagai badan yang terpercaya untuk membangun ummat.⁷⁰

3. Struktur Organisasi



⁷⁰Data badan Amil Zakat Kota Palopo

4. Fungsi BAZNAS Kota/Kabupaten

- a. Perancangan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, dan
- c. Melakukan verifikasi administrative dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- e. Satuan Audit Internal.

5. Tata Cara Kerja BAZNAS

a. Wakil Ketua I

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat;
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki; dan
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

b. Wakil Ketua II

- 1) Penyusunan strategi dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

c. Wakil Ketua III

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota;
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota;
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota;
- 5) Pelaksanaan sistem skuntansi BAZNAS kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/kota; dan
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Wakil Ketua IV

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas kabupaten/kota;

- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota;
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota;
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota;
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/kota;
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota; dan
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

e. Satuan Audit Internal

- 1) Penyiapan program audit;
- 2) Pelaksanaan audit;
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KEUA BAZNAS;
- 4) Penyusunan laporan hasil audit; dan
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁷¹

B. Pertimbangan Penetapan Infak Haji di Kota Palopo

Di Indonesia terdapat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mana di dalam peraturan tersebut tidak hanya membahas atau mencakup masalah zakat saja, melainkan juga membahas masalah infak, dan sedekah. Baik Zakat, infak, ataupun sedekah masing-masing memiliki aturan yang pasti berbeda. Misalnya antara zakat dan infak. Dari segi pengertian zakat adalah

⁷¹Republik Indonesia, *Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat.*

rukun Islam ketiga yang bentuknya adalah ibadah *maliyah ijtimai'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan *muzakki* dan *mustahiq*.⁷²

Zakat hukumnya adalah wajib, yang mana jika seorang *muzakki* hendak mengeluarkan zakat maka harus memperhatikan hal-hal yang terkait yaitu mengenai *nisab* dan *haulnya*, yang nanti setelah terpenuhi unsur-unsur tersebut maka akan dikeluarkan 2.5% dari jumlah harta keseluruhan. Sedangkan infak adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki bentuk dua dimensi, yaitu dimensi vertikal yang berarti merupakan wujud dari sebuah ketaatan seorang hamba kepada *rabb-Nya*. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang adalah merupakan suatu perwujudan dari suatu bentuk sikap peduli dari seorang muslim kepada muslim lainnya.⁷³ Hal yang membedakan antara Infak dan Zakat yaitu, karena dalam Infak tidak mengenal *nisab* serta *haul*. Maksudnya, seseorang yang hendak memberikan atau mengeluarkan infak maka didasarkan atas *keridhoan*, dan tanpa paksaan dari pihak-pihak manapun.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, salah satu ayatnya menyebutkan bahwa *bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji dapat dikenakan infak haji*. Yang mana infak haji tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yaitu Badan Amil Zakat Kota Palopo, Kementerian Agama Kota Palopo, Pemerintah Kota yang biasanya diwakilkan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat, MUI, KUA, IKAMU serta pihak-pihak yang turut serta berperan dalam penyebaran agama Islam, mengingat penetapan Infak haji ini dilakukan dalam satu waktu dengan zakat fitrah dan infak

⁷²Andriana, dkk, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infak (LMI) cabang Magetan Jawa Timur)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 26 No. 2, 2015, h. 2.

⁷³Qurratul'aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, ZISWAF, Vol. 3 No. 1, 2016, h. 3.

rumah tangga Muslim. Penetapan infak haji biasanya ditentukan satu pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hal tersebut dilakukan guna menghormati hak yang dimiliki oleh orang-orang yang berhak mendapatkan nilai dari infak haji tersebut.⁷⁴ Sama halnya dengan zakat, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam QS Al-Taubah/9:60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁵

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt. di atas, bahwa ada sebanyak 8 (delapan) golongan yang berhak untuk menerima zakat begitupun dengan infak, yang mana 8 (delapan) *asnaf* atau golongan tersebut, yaitu:

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil atau pengurus zakat; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

⁷⁴As'ad Syam, SE., AK., Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, Palopo, 13 Mei 2019.

⁷⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

5. Hamba Sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya
6. *Gharimin*; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. *Fisabilillah*; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁷⁶

Selain 8 (delapan) golongan tersebut sebagai mana yang telah dipaparkan di atas, adapun pihak-pihak yang biasanya menerima dana atau sumbangan yang salah satunya berasal dari infak haji yaitu: yatim dan piatu (yang belum mendapatkan penghasilan yang tetap dan dirasa mampu), pembangunan mesjid, serta biaya penelitian akhir bagi mahasiswa yang kurang mampu.⁷⁷

Di kota Palopo sendiri, Badan Amil Zakat Kota Palopo mempunyai berbagai macam program yang mana program-program tersebut juga merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan salah satunya untuk menyalurkan biaya infak haji. Adapun program-program tersebut yaitu:

1. Palopo Sehat, yaitu program yang dikategorikan dalam hal kesehatan.
2. Palopo Peduli, yaitu program yang jenis kegiatannya yaitu apabila terjadi suatu kondisi yang man hal tersebut tidak terduga, misalnya seperti kebakaran, kecelakaan, sedang dalam keadaan duka. Tetapi dengan syarat apabila pihak yang dimaksud tergolong ke dalam orang yang kurang mampu.
3. Palopo Cerdas, yaitu program yang dikategorikan sebagaimana nama programnya yaitu dalam hal pendidikan. Sebagai contoh kegiatan

⁷⁶<https://baznas.go.id/asnaf>.

⁷⁷Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, 08 Mei 2019.

program ini yaitu bantuan atau beasiswa untuk pendidikan bagi mahasiswa/i yang kurang mampu maksimal S1.

4. Palopo Taqwa, yaitu program yang jenis kegiatannya yaitu pengembangan ibadah, syiar islam dan sebagainya.
5. Palopo Sejahtera, yaitu program yang jenis kegiatannya berupa penyediaan modal kerja yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengajukan. Penyediaan modal kerja dapat berupa barang pendukung untuk menjalankan kerja yang akan dilakukan misalnya seperti mesin jahit, gerobak, becak. Namun bisa juga diberikan dalam uang tunai sebagai modal usaha.

Perlu diketahui bahwa dalam penyaluran infak haji baik itu kepada 8 (delapan) golongan, yatim, piatu, pembangunan mesjid, dana untuk penelitian, maupun melalui 5 (lima) program Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo, tidak dikhususkan bahwa dana yang digunakan hanyalah berasal dari infak jemaah haji saja, melainkan juga berasal dari infak yang lainnya. Baik itu infak terikat maupun infak yang tidak terikat misalnya infak pendapatan jasa, dan infak rumah tangga muslim. Penyaluran infak haji ini biasanya akan disalurkan secepatnya setelah terkumpul atau dikondisikan berdasarkan pihak-pihak penerima dana infak.⁷⁸

Setiap tahun dalam waktu yang telah ditentukan, pihak Badan Amil Zakat Kota Palopo akan mengadakan rapat guna membahas penetapan jumlah infak haji, zakat fitrah, dan infak rumah tangga muslim. Dalam penetapan tersebut, BAZNAS bukanlah satu-satunya pihak yang memutuskan hal tersebut. Melainkan, pihak-pihak lain juga turut serta dalam musyawarah memberikan usulan-usulan serta bahan pertimbangan dalam menetapkan. Pihak-pihak

⁷⁸As'ad Syam, SE., AK., Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 13 Mei 2019.

yang dimaksud yaitu Kementrian Agama Kota Palopo dan Pemerintah Kota Palopo bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Dalam menetapkan khususnya, infak haji tentu terdapat banyak pertimbangan. Salah satunya yaitu Ongkos Naik Haji (ONH). Tahun ini, rata-rata ongkos haji mencapai harga kurang lebih Rp. 35.000.000,-. Sedangkan jika ongkos haji tersebut dikenakan zakat, maka tidak tercapai *nisabnya* setelah dibagikan dengan *haul* selama satu tahun. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan yang juga menjadi alasan adanya infak haji tersebut yaitu membuka peluang bagi calon jemaah haji untuk berbagi kepada sesama manusia. Melalui ini, turut serta ditanamkan nilai-nilai yang mana bahwa hidup di dunia ini tidak sendiri, tetapi juga ada manusia lain, yang mungkin saja hidupnya berbeda dengan calon jemaah haji, sehingga membutuhkan bantuan. Selain itu, melalui infak haji ini, juga ditanamkan rasa rela dan ikhlas memberi kepada sesama manusia yang ditunaikan sebelum calon jemaah berangkat ke Mekkah.

Ketentuan infak haji ini, juga harus dinilai tidak memberatkan para calon jemaah haji, mengingat bahwa nantinya di Mekkah, para calon jemaah haji telah mengeluarkan ongkos ibadah haji dalam jumlah besar serta mengingat bahwa nantinya calon jemaah haji membutuhkan uang yang tidak sedikit demi kelangsungan hidupnya selama menunaikan ibadah haji di tanah suci, Mekkah.^{79 80}

Penyampaian mengenai adanya ketentuan infak haji bagi calon jemaah haji ini, tidak disampaikan langsung oleh BAZNAS kota Palopo kepada calon jemaah haji melainkan disampaikan oleh Kementrian Agama. Pembayaran infak haji ini juga tidak dibayarkan tunai kepada suatu lembaga atau suatu pihak melainkan

⁷⁹Moh. Hatta A. Toparakkasi, S.H., M.H., Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 08 Mei 2019

⁸⁰As'ad Syam, SE., AK., Wakil Ketua III BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 13 Mei 2019.

melalui transaksi di bank yang telah ditujuk yaitu Bank BPD syari'ah dan bank Muamalah dengan jumlah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Para calon jemaah haji selama adanya peraturan mengenai infak haji ini tidak pernah ada yang menolak atau tidak menunaikan infak ini, karena menilai infak haji tersebut adalah sebuah peraturan yang mana tentu harus diikuti serta menganggap dan mempercayai bahwa hal tersebut akan menimbulkan manfaat bagi orang lain.

Sebenarnya, ketentuan mengenai infak haji ini telah diberlakukan bahkan sebelum adanya peraturan daerah kota Palopo nomor 06 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat ini. Yang mana nilai yang tertanam dalam diadakannya infak haji ini sejatinya adalah mengajarkan manusia untuk saling berbagi kepada manusia yang lebih membutuhkan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Infak Haji

Ibadah haji memiliki beberapa hikmah yang agung, rahasia, yang tinggi, tujuan yang mulia, yang terkumpul di dalamnya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Tujuan disyariatkannya ibadah ini sama dengan ibadah lainnya yaitu menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada Tuhan hamba itu sendiri, dari penyimpangan agam-agama lain menuju keadilan Islam, dan dari sempitnya dunia menuju kelapangannya. Ibadah haji adalah ibadah yang memiliki banyak keutamaan yang melebihi dari ibadah-ibadah lainnya. Karena, ibadah haji adalah ibadah jiwa dan raga serta harta.

Seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji hendaklah melakukannya dengan ikhlas karena Allah *Ta'ala*, Tuhan alam semesta. Dalam melaksanakan ibadah haji, Ia tidak bermaksud untu bersenang-senang dan jalan-jalan, dan tidak juga berdagang, tidak memiliki sifat ria, yaitu ingin didengand

dilihat oleh orang lain, tetapi semata-mata hanya mengharap ganjaran dari Allah *Ta'ala*, berambisi untuk mendapatkan ampunan-Nya.

Menurut ajaran Islam, umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah swt. dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut dibutuhkan adanya kerja sama, tolong-menolong, dan saling menjamin di antara umat manusia.

Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Konfigurasi dari ajaran ini diantaranya yaitu adalah perintah untuk berinfak. Mereka yang sangat berkecukupan hendaknya membantu kepada mereka yang tidak mampu, dan mereka yang mempunyai kelonggaran membantu orang-orang yang kesulitan. Menjalin persaudaraan sesama umat manusia memang sangat penting karena dalam kenyataannya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan ini diperlukan kerja sama antar-umat manusia.⁸¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Zukhruf/43: 32, yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia,

⁸¹Uswatun Hasanah, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Asy-Syir'ah, Vol. 47 No. 1, 2013, h. 240.

dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸²

Berdasarkan ayat tersebut, kata derajat yang dimaksud tidak selalu bermakna sebagaimana derajat atau kedudukan. Derajat tersebut dapat juga diartikan bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga, individu yang memiliki kelebihan dapat menutupi individu yang kekurangan. Hal tersebut turut serta menjadi salah satu cara sehingga adanya kerja sama dalam hidup yang dimaksud.

Perintah untuk saling tolong-menolong antar manusia ini, juga terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 2, Sebagaimana yang difirmankan Allah swt.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁸³

⁸²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁸³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Secara jelas, ayat tersebut memuat mengenai kewajiban seorang muslim untuk saling memberikan bantuan kepada seorang yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk perbuatan yang baik-baik bukan dalam bentuk hal-hal yang dilarang dalam agama sebagai wujud realisasi kewajiban sosial dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menegakkan agama. Karena sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik dan akan meridhainya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa tujuan dari diadakannya infak haji khususnya di kota Palopo yaitu untuk membantu para jemaah atau memfasilitasi calon jemaah haji untuk menolong sesama kaum mu'min yang membutuhkan atau dalam keadaan tidak mampu. Selain itu, melalui infak haji ini Badan Amil Zakat kota Palopo memudahkan untuk menyalurkan infak yang diberikan untuk dimanfaatkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

Menginfakkan sebagian harta yang dimiliki juga merupakan sebuah tindakan yang diamahkan oleh Allah swt. kepada kaum mu'min terhadap rezeki yang telah dititipkan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah/2: 254 yang memerintahkan untuk berinfaq:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.⁸⁴

Ada banyak hikmah yang dapat diambil dari konfigurasi kedermawanan tersebut, diantaranya adalah untuk meningkatkan rasa keimanan kepada Allah swt., menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir,

⁸⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Dari beberapa hal yang dijabarkan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa infak haji ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hukumnya boleh (jaiz). Walaupun, mengenai infak haji baik dalam ayat maupun hadis sama-sama tidak menyertakan mengenai *nisab* atau batasan yang harus dikeluarkan, namun dengan menyoroti tujuan beserta manfaat dari adanya infak haji ini, yang merupakan sebuah kemaslahatan maka penetapan jumlah infak haji oleh Badan Amil Zakat kota Palopo yang dimusyawarahkan bersama Kementrian Agama kota Palopo, dan Pemerintah kota Palopo bagian Kesejahteraan Rakyat, selama dinilai tidak memberatkan calon jemaah haji dan calon jemaah haji tidak merasa keberatan atau bahkan terdzalimi menurut penulis boleh saja. Mengingat bahwa, jemaah haji yang melakukan perjalanan ke tanah suci tentu membutuhkan dan mengeluarkan uang yang banyak baik untuk dijadikan sebagai uang saku, juga untuk orang-orang yang ditinggalkan.

Calon jemaah haji yang nantinya akan menunaikan ibadah haji, harus menyediakan nafkah untuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Karena, bisa jadi apabila ia pada saat mengadakan safar tidak akan kembali lagi, sehingga calon jemaah haji adabnya harus melepaskan diri dari kezhaliman, melunasi hutang-hutangnya, dan menyediakan nafkah bagi orang yang ditanggungnya dan/atau orang yang memiliki hak terhadapnya.⁸⁵

Penulis beranggapan, bahwa calon jemaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, Mekkah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah untuk golongan-golongan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian yang

⁸⁵Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunna Nabi)*, h. 99.

sebelumnya, sama halnya dengan zakat. nafkah yang dimaksudkan disini bisa saja berupa infak.

Penulis juga beranggapan, bahwa calon jemaah haji yang sudah siap untuk berangkat tentunya tergolong dalam golongan yang kecukupan dan betul-betul mampu secara finansial dalam hal ini, sehingga dengan jumlah infak haji yang ditetapkan tidak memberatkan calon jemaah haji.

Namun, sesungguhnya Allah swt. berfirman bahwa orang yang melakukan infak di jalan Allah adalah termasuk kunci rezeki, apalagi nantinya infak haji yang disetorkan akan dimanfaatkan dan diberikan kepada orang yang betul-betul membutuhkannya, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Saba'/34: 39, yaitu:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَلْفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.⁸⁶

Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata: "Betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan apa yang diperbolehkan-Nya, niscaya Dia akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran. Selain itu, Allah menegaskan janji-Nya dalam ayat ini kepada orang yang berinfaq untuk menggantinya dengan rizki (lain) melalui tiga penegasan. Dalam hal ini, Ibnu Asyur berkata : "Allah menegaskan janji tersebut dengan kalimat bersyarat, dan dengan menjadikan jawaban dari kalimat bersyarat itu dalam bentuk jumlah

⁸⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahny*, h. 432.

ismiyah dan dengan mendahulukan musnad ilaih (sandaran) terhadap khabar fi'il nya (الْخَبَرُ الْفَعْلِي) yaitu dalam firmanNya (فَهُوَ يُخْلِفُهُ).⁸⁷

Selain ayat sebagaimana yang telah dipaparkan, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menyemangati sahabat Bilal bin Robbah *radhiyallahu 'anh*u untuk berinfak dan beliau bersabda:

أَنْفِقْ بِلَالُ! وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلًا لَّا

Artinya:

Berinfaklah wahai Bilal! Janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki 'Arsy (Yang Maha Mencukupi)." (HR. Al-Bazzar dan Ath-Thobroni dalam Al Kabir).⁸⁸

Makna hadits tersebut menegaskan kepada seluruh makhluk Allah agar tidak ragu dan enggan untuk berinfak, karena walaupun secara wujud atau bentuk jumlah harta yang dipunyai tersebut berkurang, namun sesungguhnya kekurangan-kekurangan tersebut akan ditutupi dengan pahala-pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan kelipatan yang tak terkira. Selain itu, Harta yang di infakkan akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya terhadapnya, dan kekurangan-kekurang yang dimiliki akan tertutupi dengan keberkahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

⁸⁷"Berinfak di Jalan Allah", *Al-Manhaj.or.id*. <https://almanhaj.or.id/943-berinfaq-di-jalan-allah.html>, 16 Mei 2019.

⁸⁸'Shahihul Jaami' no. 1512

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Infak Haji di Kota Palopo dilakukan dalam suatu forum musyawarah yang diikuti dihadiri oleh Badan Amil Zakat kota Palopo, Kementrian Agama kota Palopo dan Pemerintah kota bagian Kesejahteraan Rakyat, yang biasanya ditetapkan satu pekan sebelum bulan suci Ramadan dan bersamaan dengan penetapan jumlah zakat fitrah, dan infak rumah tangga muslim.
2. Pertimbangan sehingga ditetapkan infak sebagai satu perlengkapan bagi calon jemaah haji palopo yaitu membantu atau memfasilitasi calon jemaah haji sehingga bisa berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan dan menanamkan nilai bahwa di dunia ini kita hidup sebagai makhluk sosial yang pastinya saling bergantung dengan orang lain. Infak haji juga didasarkan dengan rasa yang tidak memberatkan bagi calon jemaah.
3. Peruntukan Infak haji di kota Palopo, yaitu: yatim piatu (yang belum berpenghasilan tetap), pembangunan mesjid, mahasiswa/I yang kurang mampu dan sedang melakukan penelitian, maksimal S1. Selain itu, berikut adalah perumtukan infak haji di kota Palopo:
 - a. Fakir;
 - b. Miskin;
 - c. Amil atau pengurus zakat;
 - d. Mu'allaf

- e. Hamba Sahaya;
- f. *Gharimin*;
- g. *Fiisabilillah*;
- h. Ibnu Sabil.
- i. Program-program, yaitu:

- 1) Palopo Sehat;
- 2) Palopo Peduli;
- 3) Palopo Cerdas;
- 4) Palopo Taqwa; dan
- 5) Palopo Sejahtera.

Namun, peruntukan-peruntukan sebagai mana yang disebutkan tidak hanya semata-mata diambil dari infak haji melainkan dari dana-dana yang lain.

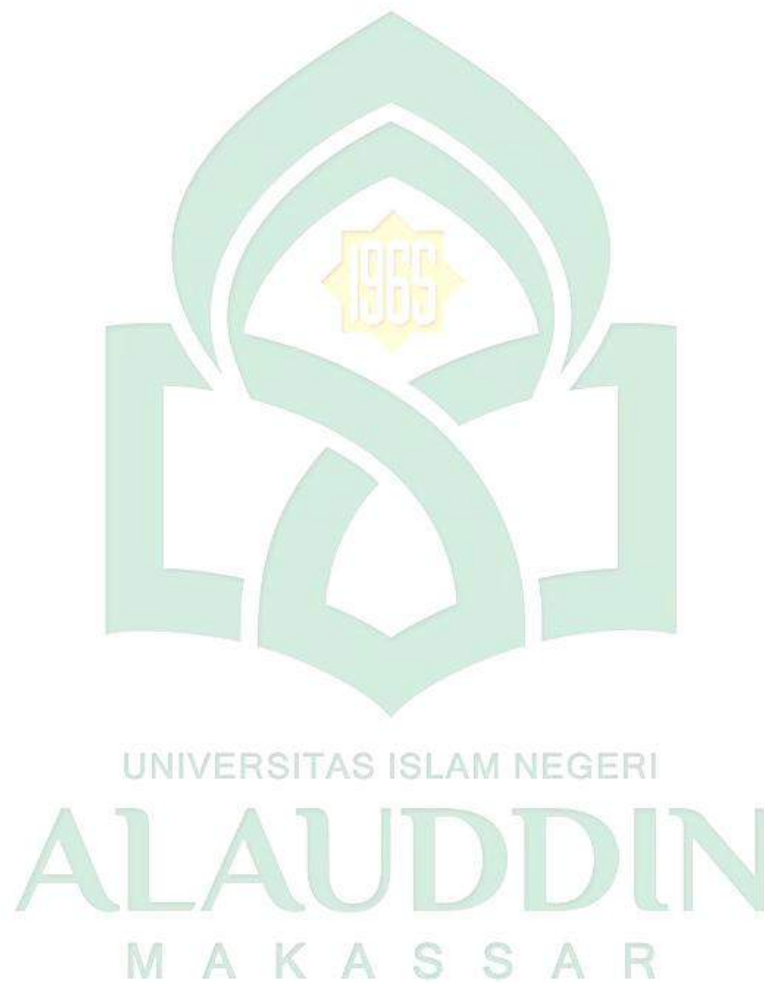
- 4. Adanya infak haji serta penetapan jumlahnya dinilai boleh dan tidak melanggar nilai-nilai syariah menimbang fungsi dari infak haji it sendiri, dan tidak memberatkan calon jemaah yang notabnya juga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup untuk di tanah suci nantinya.

B. Implikasi

Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Penyampaian mengenai adanya infak haji sebaiknya disampaikan kepada tiap-tiap calon jemaah haji yang melakukan pendaftaran, serta memaparkan hal-hal yang berkaitan, misalnya manfaat, peruntukan infak haji tersebut, serta pertimbangan sehingga ditetapkan jumlah infak haji pada saat itu.

2. Hendaknya nilai dari infak haji yang ditetapkan betul-betul tidak sampai memberi kesan memberatkan bagi calon jemaah haji, sehingga penulis beranggapan bahwa perlunya melibatkan atau mengikutsertakan perwakilan masyarakat atau calon jemaah haji dalam menentukan jumlahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"* (Jakarta: Galangpress, 2010).
- Agil Husin Al Munawar, Said dan Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2013).
- Ali Hasan, M. *Tuntutan Haji: Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Andriana, dkk, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infak (LMI) cabang Magetan Jawa Timur)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 26 No. 2, 2015.
- Ali Hasan, M., *Zakat dan Infak: Salah Stu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).
- Aris Munandar, *109 Jamaah Haji Kota Palopo Tina dengan Selamat*, (Online 24 Jam, 30 Agustus, 2018) <http://online24jam.com/2018/08/30/117038/109-jamaah-haji-kota-palopo-tiba-dengan-selamat/>
- Ary Rhm, *CJH Palopo jadi 128 Orang*. (Palopo Pos, 30 Agustus, 2016) <https://palopopos.fajar.co.id/2016/08/30/cjh-palopo-jadi-128-orang/>
- Berinfak di Jalan Allah", *Al-Manhaj.or.id*. <https://almanhaj.or.id/943-berinfak-di-jalan-allah.html>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2013).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Empat Satu, Kelompok, *Cara Mudah Naik Haji: Buku Panduan Untuk Calon Haji dan Umroh*, (Bandung: Penerbit Mizan.
- Fardan Ngoyo, Muh. dan Lince Bulutoding, *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*, Iqtisaduna. Vol. 2 No. 2, 2016
- Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: PT. Desindo Putra Mandiri, 2017).
- Hasanah, Uswatun *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Asy-Syir'ah, Vol. 47 No. 1, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 2013).
- Hastuti, Qurratul' Aini Wara, *Infak Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Ziswaf, Vol. 3, No. 1, 2016.

<https://baznas.go.id/asnaf>.

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2010, 2014 dan 2015”, *Badan Pusat Statistik Kota Palopo*.
<https://palopokota.bps.go.id/statictable/2016/10/13/7/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-palopo-tahun-2010-2014-dan-2015.html>

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. I, Bandung: Cordoba, 2013).

Kota Palopo”, *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo“.

M. Hasbi ash-Shiddieqi, Tgk, *Pedoman Haji* (Cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010).

Nawawi, Imam, *Matan Hadist Arba'in*, (Jakarta: Nizhom,t.th)

Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari, *Haji Bersama Nabi (Petunjuk Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi)*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009)

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Subianto, Achmad, *Shadaqah, Infak, dan Zakat sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia Bersih, Sehat dan Benar*, (Jakarta Pusat: Yayasan Bermula dari Kanan, 2004)

Pangerang Moenta, H. Andi dan H. Syafa'at Anugerah Perdana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT. Raja Garafindo Press, 2018).

Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Amil Zakat.

Quraish Shihab, M. *Tafsîr al-Mishbâh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sujamto, dkk, *Proses Pembuatan Undang-Undang No. 5 Tahun 1947 Tantang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991).

Sabir, Muh. Sadli, Skripsi, *Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar (Analisis Yuridis, Politis, dan Konstitusional)*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul **“Studi Analisis Terhadap Penetapan Infak Bagi Calon Jemaah Haji Oleh Badan Amil Zakat Kota Palopo”** bernama lengkap Andi Musfira, NIM: 10100115129 adalah merupakan Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Arfa Wahid, S.E. dan Ibu Andi Patriani, S.Pd. Lahir pada tanggal 18 Maret 1998 di Ujung Pandang. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 15 Salolo pada tahun 2003-2009 di Kota Palopo, selanjutnya pada tahun 2009-2012 Penulis melanjutkan pendidikan ke RSBI SMP Negeri 1 Kota Palopo, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kota Palopo. Setamat SMA, pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan sekolah tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Jurusan Peradilan.